

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan telah berkembang melampaui pelaporan keuangan tradisional, dengan penetapan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui Agenda 2030 PBB mendorong korporasi global mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, menjadikan sustainability reporting komponen strategis tata kelola perusahaan modern (Fleacă et al., 2023). Konsep ESG mengemuka sebagai kerangka dominan penilaian dampak perusahaan, namun adopsi standar pelaporan belum diikuti peningkatan kualitas pengungkapan substantif akibat kelemahan pada aspek materiality, comparability, dan assurance (Luque-Vilchez et al., 2023). Kompleksitas sistem pelaporan menciptakan asimetri informasi yang membuka ruang bagi selective disclosure dan mengaburkan kinerja keberlanjutan yang sesungguhnya (Al Amosh, 2025).

Di Indonesia, respons keberlanjutan diwujudkan melalui kerangka regulasi bertahap, mulai dari kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (UU No. 40/2007) hingga POJK No. 51/2017 yang mewajibkan emiten menerbitkan laporan keberlanjutan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Minat investor terhadap investasi ESG pun meningkat, terutama pada periode pandemi (Dewi & Harto, 2023). Namun, implementasi pengungkapan ESG masih menghadapi kendala berupa ketertinggalan dari target dan inkonsistensi format pelaporan yang mengurangi kredibilitas informasi (Angir & Weli, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan

regulasi saja tidak menjamin kualitas pengungkapan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan internal yang kuat.

Sektor *Consumer non-cyclicals* memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena memproduksi barang kebutuhan pokok dengan dampak keberlanjutan yang konstan dan signifikan. Keterkaitannya dengan rantai pasok agribisnis menuntut tanggung jawab besar dalam pengelolaan limbah, emisi karbon, dan kesejahteraan masyarakat (Rahayu et al., 2025). Meskipun memiliki eksposur tinggi terhadap isu lingkungan dan sosial, pengungkapan keberlanjutan sektor ini masih rendah dan belum optimal (Handayani et al., 2025).

Data OJK per November 2024 mencatat 17% perusahaan pasar modal belum memenuhi kewajiban laporan keberlanjutan, dan dari 50 emiten terbesar baru 80% yang mengungkapkan emisi lingkup 3, kondisi yang oleh OJK sendiri disebut masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi industri (CNBC Indonesia, 2024). Penelitian terhadap PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menemukan laporan keberlanjutannya belum memenuhi standar IFRS S1/S2 karena GRI Standards yang diterapkan tidak mencakup keterkaitan keberlanjutan dengan strategi bisnis dan arus kas secara komprehensif (Komala & Murtanto, 2024). Praktik greenwashing yang terindikasi pada perusahaan manufaktur BEI periode 2021–2023 tanpa sanksi tegas mengindikasikan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap integritas pengungkapan (Meilani & Mutmainah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor yang sensitif terhadap keberlanjutan belum diimbangi transparansi pelaporan yang memadai, sehingga mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan internal.

Penelitian-penelitian terbaru semakin memperkuat alasan kenapa topik ini penting untuk diteliti. Pengaruh ESG terhadap performa keuangan perusahaan tidak sama di setiap industri. Yang menarik, khusus tata kelola, pengaruhnya justru negatif pada perusahaan di Indonesia yang bergerak di banyak sektor sekaligus. Ini mengindikasikan praktik tata kelola yang masih formalistik (Nurafifah et al., 2025). Skor ESG sektor *consumer non-cyclicals* hanya mencapai 20,62% dari nilai maksimum GRI dengan pengungkapan lingkungan sebagai dimensi terlemah, padahal sektor ini bersinggungan langsung dengan ketahanan pangan nasional (Rahayu et al., 2025). Kedua temuan ini mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjawab belum adanya studi yang mengkaji bagaimana efektivitas komite audit dan proporsi dewan komisaris memengaruhi kualitas pengungkapan kinerja keberlanjutan pada sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia. Celah kontekstual ini diperparah oleh inkonsistensi temuan empiris di tingkat global, sebagaimana diuraikan berikutnya.

Meskipun studi-studi terdahulu sudah membuktikan bahwa mekanisme pengawasan internal perusahaan itu penting untuk kualitas pengungkapan keberlanjutan, hasil empiris menunjukkan belum konsisten. Pada variabel komite audit, temuan jenuh pada dimensi keahlian dan independensi untuk pelaporan keuangan, namun masih terbatas dan belum ada temuan yang jelas untuk pengawasan ESG, di mana hanya 32% perusahaan melaporkan anggota komite auditnya memiliki keahlian ESG memadai (Hermanson et al., 2023). Seberapa efektif dewan komisaris dalam mengawasi isu keberlanjutan bukan hanya berapa banyak anggota independen yang ada di dalamnya. Melainkan yang mampu mendeteksi greenwashing, di mana

independensi struktural belum tentu mereka benar-benar bersikap independen dalam praktiknya (Mohammed, 2023). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan research gap yang signifikan pada konteks sektor *consumer non-cyclicals* di pasar berkembang seperti Indonesia. Di samping itu, studi-studi terdahulu umumnya menguji indikator efektivitas komite audit secara parsial hanya ukuran keanggotaan, atau hanya frekuensi pertemuan, atau hanya kompetensi keuangan secara terpisah sehingga belum ada gambaran holistik tentang efektivitas komite audit secara keseluruhan dalam mendorong pengungkapan kinerja keberlanjutan, terutama pada sektor *consumer non-cyclicals*. Ini menjadi gap metodologis yang penelitian ini berupaya atasi melalui pendekatan indeks komposit.

Permasalahan transparansi keberlanjutan dapat dipahami melalui hubungan antara manajemen dan pemilik modal. Tanpa kontrak yang mengikat pada outcome keberlanjutan, manajer cenderung menghindari pengungkapan non-keuangan yang dianggap sebagai biaya tambahan (Bonham & Riggs-Cragun, 2023). Kondisi ini memperburuk asimetri informasi karena pemegang saham kesulitan memverifikasi apakah strategi keberlanjutan yang dijalankan benar-benar menciptakan nilai jangka panjang atau hanya sekadar pemenuhan regulasi semata. Sebagai implikasi logisnya, orientasi operasional perusahaan mutlak harus diperluas dan tidak boleh lagi berjalan dengan kacamata yang sempit. Entitas bisnis tidak lagi dapat dibenarkan apabila hanya menjadikan pengejaran laba yang maksimal sebagai satu-satunya poros tujuan. Lebih dari itu, pihak manajemen mengemban tanggung jawab strategis untuk menciptakan harmonisasi yang nyata di lapangan; yakni menyelaraskan jalannya roda aktivitas

komersial dengan komitmen penuh untuk memelihara kelestarian lingkungan sekaligus menunjang kesejahteraan sosial masyarakat yang bersinggungan langsung dengan operasional mereka (Wijayanti & Sari, 2024). Kesenjangan antara kepentingan manajemen dan tuntutan transparansi inilah yang mendasari perlunya mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk memastikan integritas pengungkapan kinerja keberlanjutan.

Sebagai respons terhadap konflik keagenan, komite audit hadir sebagai mekanisme pengawasan internal utama yang kini meluas ke aspek keberlanjutan. Berbagai literatur terdahulu telah mengonfirmasi secara empiris bahwa kualitas dan efektivitas komite audit membawa implikasi positif yang sangat signifikan terhadap eskalasi peringkat ESG (*Environmental, Social, and Governance*) sebuah entitas bisnis. Kinerja yang efektif ini sendiri terwujud manakala sebuah komite mampu memenuhi tiga indikator fundamental: tingginya tingkat independensi, mumpuninya keahlian spesifik para anggota, serta terjaganya intensitas penyelenggaraan rapat. Pada gilirannya, fungsi pengawasan yang solid dan berdaya guna tersebut terbukti ampuh dalam memacu tingkat akuntabilitas perusahaan, khususnya untuk menjamin transparansi serta kredibilitas dalam menyajikan pelaporan kinerja keberlanjutan (Jamil & Wahyuni, 2025), sejalan dengan temuan bahwa keahlian spesifik komite audit memperkuat kinerja ESG dan meminimalisasi risiko greenwashing (Sahu et al., 2025). Kendati demikian, konklusi tersebut rupanya berbenturan dengan sejumlah preseden empiris yang dipotret pada lanskap industri manufaktur di Indonesia. Pada sektor tersebut, realita data mengindikasikan sebuah anomali; di mana kepemilikan

kompetensi finansial yang mumpuni serta tingginya intensitas penyelenggaraan rapat komite audit justru menorehkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap eskalasi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menariknya, di tengah paradoks empiris tersebut, dimensi skala atau besaran komposisi dari komite audit itu sendiri masih terbukti konsisten dalam mempertahankan dampak positifnya terhadap praktik pengungkapan terkait (Khoiriyah et al., 2022). Pertentangan arah pengaruh pada komponen-komponen pembentuk efektivitas komite audit ini yang justru menjadi unsur penyusun indeks komposit X_1 dalam penelitian ini memunculkan pertanyaan mendasar apakah kualitas laporan keberlanjutan yang dihasilkan benar-benar konsisten dapat diandalkan, terutama pada sektor yang memiliki dampak lingkungan tinggi seperti *consumer non-cyclicals*.

Selain komite audit, dewan komisaris berperan sebagai pengawasan tertinggi yang memastikan strategi perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan pemangku kepentingan jangka panjang. Bukti empiris justru menunjukkan dua arah pengaruh yang saling bertentangan. Di satu sisi, semakin independen dewan komisaris, semakin luas pengungkapan ESG karena dewan komisaris lebih peka terhadap tekanan sosial dan lingkungan (Lavin & Montecinos-Pearce, 2021). Sebagai perbandingan, temuan kontradiktif justru mengemuka dari serangkaian kajian empiris yang berfokus pada sektor sumber daya alam di Indonesia. Pada lanskap industri tersebut, proporsi independensi dewan komisaris terbukti membawa pengaruh negatif yang signifikan terhadap mutu pelaporan keberlanjutan. Rasionalisasi di balik anomali ini sangat erat kaitannya dengan praktik *compliance-based signaling*, di mana kehadiran jajaran

komisaris independen acap kali direduksi fungsinya menjadi sebatas instrumen formalitas untuk menggugurkan kewajiban regulasi. Terciptanya ilusi kepatuhan struktural inilah yang pada akhirnya memicu sikap pasif; entitas bisnis merasa telah memenuhi standar tata kelola sehingga kehilangan urgensi dan motivasi untuk menyajikan pengungkapan kinerja keberlanjutan secara transparan, mendalam, dan komprehensif (Ramadhanta Noor et al., 2024). Pertentangan arah pengaruh ini menciptakan ketidakpastian mengenai sejauh mana proporsi dewan komisaris benar-benar mampu mendorong pengungkapan berkualitas, khususnya pada sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi batasan analisis, mengingat temuan pada konteks pasar yang sama di sektor *consumer cyclicals* membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan karena dewan tersebut dinilai lebih condong pada kepentingan umum dan *shareholder* (Grediani & Kapti, 2023).

Urgensi kajian diperkuat oleh dua temuan empiris terbaru. Pertama, pengungkapan ESG ternyata berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan Indonesia jangka pendek, namun menariknya ukuran perusahaan yang lebih besar mampu mengelola dampak negatif tersebut. Dinamika ini menegaskan bahwa kualitas pengungkapan membutuhkan mekanisme tata kelola internal yang efektif, bukan sekadar regulasi (Risal et al., 2024). Selain itu, profitabilitas dan leverage turut menentukan kapasitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan, sehingga keduanya perlu dikontrol agar pengaruh murni mekanisme tata kelola dapat diestimasi secara akurat.

Kedua, tinjauan empiris yang menyorot secara spesifik pada lanskap subsektor pertambangan batu bara di Indonesia selama kurun waktu 2020 hingga 2024 menghadirkan temuan yang patut dicermati. Kajian tersebut mengindikasikan bahwa praktik transparansi melalui pengungkapan informasi lingkungan nyatanya belum terbukti memiliki daya ungkit yang signifikan secara statistik terhadap fluktuasi maupun eskalasi nilai perusahaan (*firm value*). Karena investor domestik masih mendahulukan sinyal keuangan dibandingkan informasi lingkungan. Perusahaan cenderung melakukan pengungkapan hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi (Amelia et al., 2025). Dari kedua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahannya terletak pada kualitas pengawasan internal perusahaan sebuah celah yang belum banyak diteliti khususnya pada sektor consumer non-cyclicals, di mana efektivitas komite audit dan dewan komisaris berpotensi menentukan apakah pengungkapan kinerja keberlanjutan yang dibuat benar mencerminkan kondisi nyata atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini mengidentifikasi tiga gap yang belum terjawab secara bersamaan. Pertama, dari perspektif kesenjangan empiris (*empirical gap*), konstelasi literatur terdahulu masih diwarnai oleh divergensi konklusi yang tajam. Terdapat inkonsistensi arah pengaruh yang nyata terkait efektivitas komite audit dan dewan komisaris; di mana sejumlah kajian mendokumentasikan dampak positif yang solid, sementara preseden empiris lainnya justru menemukan pengaruh negatif yang signifikan. Kesenjangan ini semakin mengerucut mengingat perdebatan

akademis tersebut belum pernah diujikan secara spesifik pada lanskap sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia.

Kedua, ditinjau dari kesenjangan kontekstual (contextual gap), sektor *consumer non-cyclicals* sejatinya dihadapkan pada tingkat eksposur keberlanjutan yang krusial. Namun, realita tersebut berbenturan dengan fakta bahwa agregat skor ESG sektor ini tergolong rendah, yakni hanya menyentuh angka 20,62% dari ambang batas maksimum *Global Reporting Initiative* (GRI). Ironisnya, di tengah urgensi dan potret empiris tersebut, masih terdapat kekosongan literatur; di mana belum ada satu pun kajian komprehensif yang menelisik secara holistik bagaimana mekanisme struktur tata kelola mampu mendikte kualitas pengungkapan kinerja keberlanjutan melintasi seluruh subsektor ini.

Ketiga, gap metodologis: studi terdahulu cenderung mengukur efektivitas komite audit secara parsial melalui indikator tunggal, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas sebagai konstruk komposit dalam konteks pengungkapan ESG. Ketiga gap inilah yang menjadi landasan dan justifikasi utama penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan bahwa implementasi pengungkapan kinerja keberlanjutan yang substantif di perusahaan Indonesia masih rendah, meskipun telah terdapat regulasi

wajib seperti UU No. 40 Tahun 2007 dan POJK No. 51/POJK.03/2017. Banyak laporan keberlanjutan telah disusun hanya sebagai formalitas administratif tanpa implementasi nyata dalam operasional perusahaan, yang diperparah minimnya verifikasi eksternal terhadap laporan tersebut. Kondisi ini juga terjadi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang secara langsung berhadapan dengan isu sosial dan lingkungan, namun kualitas pengungkapan kinerja keberlanjutannya belum terukur secara komprehensif.

2. Kurangnya efektivitas komite audit dalam mengawasi praktik keberlanjutan, terutama dalam aspek keahlian, ukuran keanggotaan, dan perannya pada pengawasan non-keuangan. Padahal efektivitas komite audit yang diukur melalui indeks komposit yang menggabungkan ukuran komite audit (ACSIZE), frekuensi pertemuan (ACMEET), dan kompetensi keuangan (ACKNOW) berpotensi meningkatkan kualitas pengungkapan kinerja keberlanjutan melalui pengawasan yang ketat terhadap integritas pelaporan non-keuangan.
3. Proporsi dewan komisaris yang belum optimal di banyak perusahaan menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan strategis terhadap pelaksanaan keberlanjutan. Dewan komisaris berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan sosial-lingkungan masyarakat, namun temuan empiris masih menunjukkan inkonsistensi pengaruhnya terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan.
4. Tiga variabel kontrol yang berpotensi memengaruhi pengungkapan kinerja keberlanjutan perlu dikendalikan dalam kajian ini agar pengaruh murni mekanisme

tata kelola dapat diestimasi secara akurat. Pertama, ukuran perusahaan (firm size), di mana perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melaksanakan program dan pelaporan keberlanjutan dibandingkan perusahaan kecil. Kedua, profitabilitas (ROA), karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memiliki kapasitas finansial yang lebih memadai untuk mendukung pengungkapan keberlanjutan yang komprehensif. Ketiga, leverage (DER), mengingat perusahaan dengan beban utang yang tinggi cenderung mengalokasikan sumber daya lebih sedikit untuk kegiatan dan pelaporan keberlanjutan, sehingga tingkat leverage berpotensi memengaruhi luas pengungkapan kinerja keberlanjutan yang dilakukan perusahaan.

5. Sektor *consumer non-cyclicals* memiliki urgensi tinggi namun minim penelitian empiris terkait pengaruh tata kelola terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan. Karakteristik sektor ini yang memiliki tekanan pemangku kepentingan konstan terhadap praktik keberlanjutan menjadikannya sangat relevan untuk diteliti. Namun, hingga saat ini, penelitian masih terfragmentasi pada subsektor spesifik (misalnya hanya makanan-minuman), sehingga belum ada studi komprehensif yang menguji pengaruh struktur tata kelola terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan secara holistik pada seluruh subsektor *consumer staples* di Indonesia.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh efektivitas komite audit (diukur melalui indeks komposit yang menggabungkan komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan kompetensi keuangan komite audit terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?
2. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* (*consumer staples*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?

1.4 Pembatasan Masalah

Untuk memastikan fokus kajian yang terarah, berikut ini ditetapkan batasan-batasan cakupan yang menjadi pagar dalam kajian ini:

1. Guna menjaga kedalaman dan fokus analisis, ruang lingkup investigasi dalam riset ini dikerucutkan secara spesifik pada pengujian empiris mengenai daya ungkit efektivitas komite audit serta komposisi dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan kinerja keberlanjutan. Adapun lokus observasi pada studi ini dibatasi secara eksklusif pada entitas korporasi yang bernaung di dalam sektor *consumer non-cyclicals* (*consumer staples*) dan berstatus sebagai perusahaan publik yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Untuk mengeliminasi potensi bias serta menjaga ketahanan model regresi, kajian ini mengintegrasikan tiga instrumen variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (*firm size*), tingkat profitabilitas (ROA), dan rasio pengungkit finansial (*leverage/DER*). Secara teoretis, penyertaan ukuran perusahaan dilandasi oleh postulat bahwa entitas dengan skala operasional yang masif cenderung memiliki ketersediaan sumber daya yang jauh lebih superior, baik untuk mengeksekusi inisiatif keberlanjutan maupun menyusun pelaporan yang memadai. Selanjutnya, profitabilitas turut dikontrol dengan asumsi dasar bahwa profit yang tinggi berkorelasi langsung dengan kapasitas dan fleksibilitas finansial korporasi untuk menyajikan pengungkapan informasi secara komprehensif. Di kutub yang lain, masuknya *leverage* didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa tingginya ketergantungan entitas terhadap instrumen utang berisiko memicu restriksi alokasi kapital, yang pada gilirannya dapat membatasi ruang gerak pembiayaan aktivitas keberlanjutan. Secara holistik, orkestrasi ketiga variabel kontrol ini diimplementasikan secara spesifik untuk mengisolasi efek perancu (*confounding effects*), sehingga daya ungkit murni dari mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan kinerja keberlanjutan dapat diestimasi dengan tingkat presisi yang jauh lebih akurat.
3. Evaluasi terhadap proksi pengungkapan kinerja keberlanjutan pada riset ini dieksekusi melalui penelusuran mendalam terhadap informasi yang terdiseminasi secara publik, baik melalui medium laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Sebagai

parameter penilaian utama, studi ini mengadopsi secara ketat kerangka standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Penggunaan pedoman global tersebut diimplementasikan guna menguantifikasi secara objektif tingkat komprehensivitas pelaporan korporasi, yang secara fundamental membedah trilogi dimensi keberlanjutan: performa ekonomi, kelestarian lingkungan, serta tanggung jawab sosial.

4. Pengukuran terhadap variabel efektivitas komite audit dieksekusi melalui pendekatan indeks komposit. Indeks gabungan ini dibangun dengan meramu sejumlah dimensi terukur yang secara objektif dapat dieksplorasi langsung dari dokumen laporan tahunan perusahaan. Parameter tersebut mencakup skala ukuran komite audit (ACSIZE), intensitas penyelenggaraan rapat komite audit (ACMEET), serta tingkat penguasaan kompetensi finansial yang dimiliki oleh para anggotanya (ACKNOW), di mana perumusan operasionalisasinya telah disesuaikan secara cermat dengan realitas ketersediaan data sekunder di lapangan.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas komite audit yang diukur menggunakan indeks komposit yang terdiri atas ukuran komite audit (ACSIZE), frekuensi rapat komite audit (ACMEET), dan kompetensi

keuangan komite audit (ACKNOW) terhadap tingkat pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumen non-siklis (consumer staples) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024.

2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan kinerja keberlanjutan pada perusahaan sektor konsumen non-siklis (consumer staples) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, studi ini diestimasikan mampu mendonasikan kontribusi yang signifikan bagi perluasan khazanah literatur akuntansi dan tata kelola korporat, terkhusus pada ranah diskursus yang membedah korelasi antara arsitektur *corporate governance* dengan dinamika pengungkapan kinerja keberlanjutan. Lebih dari itu, temuan riset ini diproyeksikan untuk berfungsi sebagai rujukan empiris yang andal dalam memetakan fungsi strategis komite audit serta dewan komisaris, terutamanya bila dibedah melalui kacamata teoretis teori keagenan (*agency theory*). Dengan termanifestasikannya konklusi tersebut, kajian ini diharapkan sanggup mempertajam diskursus analitis sekaligus memperkaya pemahaman kolektif mengenai instrumen tata kelola korporat yang paling efektif dalam mengokohkan pilar transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan.

2. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, riset ini diestimasikan mampu mendonasikan implikasi strategis serta rekomendasi konstruktif bagi jajaran manajemen korporasi. Konklusi studi dapat dimanfaatkan sebagai kompas acuan dalam memformulasikan kebijakan internal guna mendorong kualitas pengungkapan keberlanjutan, utamanya melalui optimalisasi mekanisme tata kelola internal yang menitikberatkan pada akselerasi efektivitas komite audit serta evaluasi peran dewan komisaris. Di samping itu, temuan empiris ini diandalkan untuk berfungsi sebagai instrumen referensi yang esensial bagi para investor maupun kelompok pemangku kepentingan eksternal lainnya dalam meneropong serta mengukur tingkat kredibilitas transparansi keberlanjutan suatu entitas bisnis. Pada akhirnya, manifestasi kajian ini diharapkan mampu mengokohkan fondasi proses pengambilan keputusan finansial dan investasi yang berorientasi jangka panjang, sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan yang berkelanjutan.

3. Manfaat Kebijakan dan Regulasi

Secara implikatif, kajian ini diproyeksikan untuk mempersembahkan umpan balik konstruktif serta kontribusi kebijakan bagi para regulator dan otoritas pasar modal, termasuk di dalamnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konklusi riset ini dapat dijadikan landasan analitis dalam menyempurnakan kerangka regulasi yang membingkai pelaporan keberlanjutan, sekaligus memantapkan instrumen

pengawasan terhadap tata kelola perusahaan terbuka—dengan atensi khusus yang diarahkan secara tajam pada emiten-emiten yang beroperasi di sektor *consumer non-cyclicals* di bawah naungan Bursa Efek Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Pengorganisasian struktur penulisan dalam riset ini dirancang sedemikian rupa guna menghadirkan alur diskursus yang terang, tertib, dan berlapis secara sistematis. Kerangka penyajian tersebut sengaja dibangun untuk memandu para pembaca agar dapat menyerap esensi studi secara bertahap dan komprehensif, mulai dari titik tolak latar belakang masalah hingga bermuara pada konklusi akhir. Adapun rincian sistematika pembahasan yang melandasi penyusunan karya ilmiah ini dijabarkan melalui urutan berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai dasar pemikiran, ruang lingkup, dan arah penelitian yang akan dilakukan sehingga pembaca dapat memahami konteks serta tujuan penelitian secara keseluruhan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian, kerangka pemikiran yang

menggambarkan hubungan antarvariabel, serta hipotesis yang diajukan sebagai dasar pengujian dalam penelitian ini.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan objek dan ruang lingkup penelitian, jenis serta pendekatan penelitian yang digunakan, operasionalisasi variabel penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

